

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MALINAU



LKjIP
LAPORAN KINERJA
INSTANSI PEMERINTAH
DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN MALINAU
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, Pelaporan Kinerja Pemerintah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022 selesai disusun.

Sejalan dengan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, maka Dinas Pendidikan memgemban tugas dan tanggung jawab dalam pencapaian keberhasilan kinerja pemerintah. dan melalui Pelaporan Kinerja Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan perwujudan kongkrit tingkat pencapaian kinerja (*performing government*) Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan kegiatan dalam periode Tahun 2021-2026

Diharapkan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh stakeholder tentang pencapaian kinerja kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Pendidikan dalam periode 2021-2026. Untuk itu kami sangat mengharapkan adanya dukungan dari semua pihak dalam pencapaian kinerja sesuai Target Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau.

Malinau, 29 Maret 2023

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau.



Dr. Dumberbril, SE.,MM.
NIP. 19690314 200112 1 001

RINGKASAN EKSEKUTIF

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah bahwa Perjanjian Kinerja. Berdasarkan hal tersebut maka dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menyusun Pelaporan Kinerja Tahun 2022.

Pada dasarnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan yang memberikan penjelasan mengenai pencapaian kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau selama Tahun 2022. Capaian Kinerja (*performene result*) Tahun 2022 tersebut dibandingkan dengan Perjanjian Kinerja (*performance agreement*) Tahun 2022 sebagai tolok ukur keberhasilan tahunan organisasi.

Pelaporan Kinerja Tahun 2022 ini merupakan laporan kinerja atas pencapaian sasaran strategis dan indikator kinerja yang telah ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagaimana tercantum dalam dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun Anggaran 2022 Dinas Pendidikan telah diperjanjikan.

Sejak dikeluarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah dimana Pemerintah Pusat memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah, Kabupaten Malinau telah memasuki paradigma baru dalam menyelenggarakan otonomi daerah. Adanya paradigma baru tersebut membawa konsekuensi terhadap perubahan sikap, mental dan perilaku aparatur yang seluruhnya diarahkan untuk menciptakan pemerintahan yang baik (*good governance*) dimana akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat menjadi pilarnya.

Berdasarkan hasil pengukuran, tingkat pencapaian sasaran Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau melaksanakan 32 (tiga puluh dua) Sub Kegiatan, 10 (sepuluh) Kegiatan strategis dalam 3 (tiga) Program untuk memenuhi sasaran strategis. Penilaian sendiri (self Assesment) atas Rencana Kinerja Tahun 2022 menunjukkan bahwa capaian kinerja Dinas Pendidikan sudah menunjukkan prestasi yang cukup memuaskan. Persentase capaian kinerja pada setiap indikator kinerja Dinas Pendidikan Tahun 2022 rata-rata mencapai 100%

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Dasar Pembentukan Organisasi	1
B. Kedudukan Tugas Pokok dan Fungsi.....	1
C. Aspek Strategis Organisasi	3
D. Struktur Organisasi	3
E. Sumber Daya Manusia	5
F. Permasalahan Utama Yang dihadapi Organisasi.....	6
G. Sistematika Penyajian	8
BAB II PERENCANAAN KINERJA	9
A. Rencana Strategis Tahun 2016-2021	9
1. Tujuan dan Sasaran	10
2. Indikator Kinerja	10
3. Strategi dan Arah Kebijakan	12
4. Program	15
B. Rencana Kerja Tahunan	15
C. Perjanjian Kinerja.....	16
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	18
A. Capaian Kinerja Organisasi	19
B. Analisis Capaian Kinerja.....	19
C. Realisasi Anggaran.....	43
BAB IV PENUTUP	51

BAB I

PENDAHULUAN

A. Dasar Pembentukan Organisasi

Dasar Pembentukan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah Peraturan Daerah No. 4 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Perangkat Daerah Kabupaten Malinau.

Sebagai acuan untuk menyusun perencanaan kegiatan Instansi Pemerintah tahun berikutnya dan sebagai barometer/tolok ukur keberhasilan kegiatan instansi Pemerintah. Dinas Pendidikan selaku OPD Kabupaten Malinau mempunyai tugas pokok membantu Bupati Malinau dalam penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Malinau.

Dalam perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Malinau, capaian, tujuan dan sasaran pembangunan yang dilakukan tidak hanya mempertimbangkan visi dan misi daerah, melainkan kondisinya dengan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai pada lingkup pemerintahan Kabupaten, Provinsi dan Nasional.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pendidikan selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

B. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah, khususnya bidang pendidikan sesuai dengan Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan Tugas Pokok, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 Dinas Pendidikan mempunyai Tugas Pokok membantu Bupati dan tugas perbantuan menyelenggarakan urusan bidang pendidikan.

Tujuan dari penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai tingkatan pencapaian

Kinerja Sasaran, Program dan Kegiatan serta Indikator makro baik keberhasilan-keberhasilan kinerja yang telah dicapai maupun kegagalan pada periode tahun tertentu.

Pencapaian kinerja sasaran diperoleh dengan cara membandingkan target dengan Realisasi Indikator sasaran pencapaian kinerja program dan kegiatan diperoleh dengan cara membandingkan target dengan realisasi indikator kinerja kegiatan yang terdiri dari *Input*, *Output* dan *Outcome*, sedangkan pencapaian indikator makro dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi indikator makro.

Dalam rangka melaksanakan tugas pokok tersebut Dinas mempunyai fungsi :

1. Perumusan Perencanaan kebijakan teknis Pendidikan dengan pengelolaan pembinaan umum, pemberian bimbingan berdasar kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Pengawasan dan pengendalian teknis Dinas Pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Pembinaan dan bimbingan terhadap lingkup Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau;
4. Pengelolaan tata usaha Dinas Pendidikan.

Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan, Pembangunan dan Pelayanan Masyarakat, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau ditunjang dengan rincian Struktur Organisasi berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor Nomor 43 Tahun 2016 Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau terdiri atas 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretaris. 3 (Tiga) Kepala Bidang, 2 (dua) Kepala Sub Bagian, 9 (sembilan) Kepala Seksi, serta Kelompok Jabatan Fungsional dengan rincian sebagai berikut

1. Kepala Dinas
2. Sekretaris Dinas, membawahi :
 - a. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
 - b. Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
3. Kepala Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, membawahi :
 - a. Kepala Seksi Sarana dan Prasarana
 - b. Kepala Seksi Kelembagaan dan Peserta Didik
 - c. Kepala Seksi Kurikulum
4. Kepala Bidang Pembinaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan, membawahi :
 - a. Kepala Seksi PTK PAUD dan PNF
 - b. Kepala Seksi PTK Sekolah Dasar
 - c. Kepala Seksi PTK Sekolah Menengah Pertama
5. Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan PNF, membawahi :
 - a. Kepala Seksi PAUD
 - b. Kepala Seksi Pendidikan Non Formal
 - c. Kepala Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan

C. Aspek Strategis Organisasi

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya dan masyarakat. Pendidikan meliputi pengajaran keahlian khusus, dan juga sesuatu yang tidak dapat dilihat tetapi lebih mendalam yaitu pemberian pengetahuan, pertimbangan dan kebijaksanaan. Salah satu dasar utama pendidikan adalah untuk mengajar kebudayaan melewati generasi.

Perencanaan dan perancangan pendidikan pada hakekatnya merupakan pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan yang terpadu. Eksploitasi sumber daya manusia yang tidak memperhatikan kearifan lokal diduga akan menyebabkan krisis identitas. Pemanfaatan dan pengelolaan pendidikan melalui proses perencanaan dan perancangan memerlukan pendekatan yang komprehensif dan terpadu. Penerapan kearifan lokal (lokal wisdom) merupakan suatu upaya dalam rangka mewujudkan lingkungan pendidikan binaan yang harmoni dan sustainable melalui pemanfaatan pengetahuan lokal (indigenous knowledge), pendekatan kontekstual serta pendekatan partisipatif. Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau berusaha untuk mewujudkan masyarakat Daerah Kabupaten Malinau yang berpendidikan dan berkarakter sebagai konsekuensi dari perkembangan dewasa ini yang menuntut adanya SDM yang berkualitas agar mampu berinteraksi dan bersaing secara mantap dalam percaturan kehidupan global yang tiada lagi batas-batas dinding kewilayahan. Dengan demikian diharapkan akan terwujud masyarakat yang berkualitas sehingga dapat menjadi subjek pembangunan yang handal demi kelangsungan dan keberhasilan pembangunan di segala bidang kehidupan.

Sejalan dengan itu adalah peran dan fungsi utama pemerintah untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat dalam mengembangkan kreatifitas dan inovasinya sehingga semua potensi yang dimiliki masyarakat dapat didayagunakan untuk kesejahteraan masyarakat.

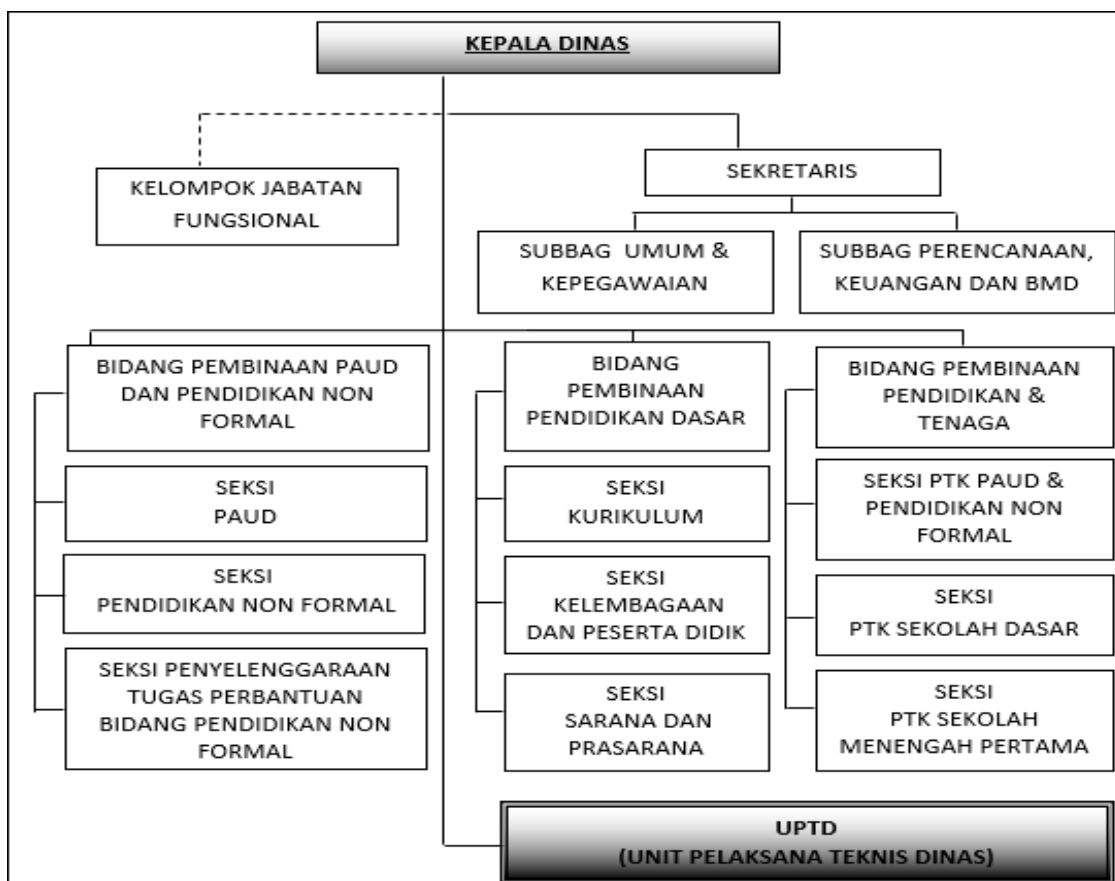
Di dalam upaya mengidentifikasi secara sistematis berbagai faktor untuk merumuskan strategi kebijakan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, yaitu dengan menggunakan model analisis situasi SWOT (Strength, Weaknesses, Opportunities, and Threat)

D. Struktur Organisasi

Dalam rangka melaksanakan tugas layanan pendidikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi) sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Bupati Malinau Nomor 43 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Daerah, memiliki Struktur Organisasi sebagai berikut :

- I. Kepala Dinas
- II. Sekretaris
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan BMD
- III. Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - 1. Seksi PAUD
 - 2. Seksi Pendidikan Non Formal
 - 3. Seksi Penyelenggaraan Tugas Perbantuan Bidang Pendidikan
- IV. Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar
 - 1. Seksi Kurikulum
 - 2. Kelembagaan dan Peserta Didik
 - 3. Seksi Sarana dan Prasarana
- V. Bidang Pembinaan Pendidikan dan Tenaga Kependidikan
 - 1. Seksi PTK PAUD dan Pendidikan Non Formal
 - 2. Seksi Sekolah Dasar
 - 3. Seksi Sekolah Menengah Pertama
- VI. Unit Pelaksana Teknis Dinas
- VII. Kelompok Jabatan Fungsional

STRUKTUR ORGANISASI DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU



E. Sumber Daya Manusia

Berdasarkan kebutuhan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, kualifikasi staf yang dibutuhkan pada setiap level adalah sebagai berikut:

1. Semua Kepala Bidang dan Kepala Seksi seharusnya memiliki kualifikasi sesuai dengan bidang tugas dan paling tidak memiliki pendidikan Strata I dalam bidang pendidikan, hukum, manajemen dan/atau teknik sipil.
2. Setiap Kepala Sub.Bagian pada Sekretariat seharusnya memiliki kualifikasi strata I dalam bidang perencanaan, hukum, keuangan, komunikasi dan administrasi/manajemen.
3. Staf di seksi teknis seharusnya 70% memiliki kualifikasi Strata I, 20% sertifikat diploma/sertifikasi training yang relevan dengan isu pendidikan. Sedangkan 10% cukup berpendidikan SMU dan SLTP.
4. Kelompok fungsional di dalam organisasi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 90% minimal berkualifikasi Strata I dan 10% cukup Diploma yang berkaitan dengan tugas fungsinya.

Sosok Aparatur Dinas Pendidikan hendaknya memiliki pengetahuan dan berbagai permasalahan pendidikan dan kemampuan koordinasi dan kerjasama dengan berbagai pihak, pengetahuan tentang kependidikan, memahami dan berpengalaman dalam proses-proses keorganisasian. Kemampuan dalam melakukan pembinaan dan kepemimpinan. Selain itu juga harus mampu berkomunikasi secara efektif dan memberikan pelayanan informasi.

Tabel 1.1
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan, UPTD dan Pengawas Sekolah
Kabupaten Malinau Tahun 2022

No.	Bagian/Bidang	Jumlah
1.	Kepala Dinas	1
2.	Sekretariat	22
3.	Bidang Pembinaan PAUD & Pend. Non Formal	13
4.	Bidang Pembinaan Pendidikan Dasar	13
5.	Bidang Pembinaan PTK	14
6.	UPTD	13
7.	Pengawas Sekolah (Jabatan Fungsional)	18
Jumlah		94

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

Tabel 1.2
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pendidikan Tahun 2022

No.	Pendidikan	Jumlah	Keterangan
1.	Pasca Sarjana (S2)	13	
2.	Sarjana (S1)	55	
3.	Diploma IV (D-IV)	1	
3.	Diploma III (D-III)	2	
4.	Diploma II (D-II)	4	
5.	Diploma I (D-I)	-	
6.	SMA	19	
7.	SMP	-	
8.	SD	-	
Jumlah		94	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

Tabel 1.3
Jumlah Pegawai Dinas Pendidikan
Kabupaten Malinau Berdasarkan Pangkat/Golongan/Ruang Tahun 2022

No.	Pangkat / Golongan Ruang	Jumlah	Keterangan
1.	Pembina TK. I IV/b	6	
2.	Pembina IV/a	30	
3.	Penata TK. I III/d	9	
4.	Penata III/c	4	
5.	Penata Muda TK. III/b	8	
6.	Penata Muda III/a	13	
7.	Pengatur TK. I II/d	8	
8.	Pengatur II/c	2	
9.	Pengatur Muda TK. I II/b	4	
10.	Pengatur Muda II/a	3	
11.	Juru TK. I I/d	-	
12.	Juru I/c	-	
13.	Juru Muda TK. I I/b	-	
14.	Juru Muda I/a	-	
Jumlah		87	

Sumber : Sub Bagian Umum dan Kepegawaian (2022)

F. Permasalahan Utama Yang Dihadapi Organisasi

Setelah melakukan telahan dan evaluasi terhadap capaian kinerja pembangunan pendidikan lima tahun terakhir, masih ada permasalahan yang perlu mendapatkan perhatian yang serius dalam kurun waktu lima tahun mendatang, antara lain adalah:

Angka partisipasi pendidikan di Kabupaten Malinau untuk jenjang pendidikan SD/MI dan SMP/MTs tercatat masih rendah yang menunjukkan masih adanya penduduk usia sekolah yang belum menikmati pendidikan pada jenjang menurut usia. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya jangkauan pelayanan pendidikan menengah dan atas bagi penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau terutama di daerah pedalaman dan perbatasan.

Perluasana jangkauan dan mutu layanan pendidikan di Kabupaten Malinau sangat ditentukan oleh ketersediaan prasarana dan sarana pendidikan. Sampai tahun 2022 ketersediaan jumlah sekolah dan guru untuk jenjang SD/MI dan SMP/MTs masih belum memadai sehingga dapat menghambat pelayanan pendidikan. Permasalahan yang harus diatasi dalam lima tahun mendatang adalah terbatasnya prasarana dan sarana pendidikan dan juga terbatasnya jumlah guru untuk setiap jenjang pendidikan di setiap kecamatan.

Adapun permasalahan utama yang dihadapi organisasi adalah :

- a. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan anak usia dini (PAUD) yang berkualitas masih perlu ditingkatkan,
- b. Tingkat perluasan akses dan pemerataan pendidikan dasar yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga perlu mendapatkan perhatian serius,. dapat kita lihat ada kesenjangan (gap) yang cukup lebar antar kecamatan dan hal ini perlu ada intervensi yang serius dari pemerintah kabupaten agar kesenjangan tersebut tidak terlalu lebar dengan cara menambah daya tampung dan membuka unit-unit sekolah baru di kecamatan-kecamatan yang capaian indikatornya masih jauh dari harapan.
- c. Peningkatan perluasan akses dan pemerataan pendidikan menengah yang berkualitas adalah permasalahan lain yang juga harus mendapatkan perhatian dan penanganan serius, hal ini bisa kita lihat dari beberapa indikator yang sebarannya masih terjadi kesenjangan antar kecamatan.
- d. Peningkatan kontribusi dan peran pendidikan nonformal dalam menunjang sukses program wajar dikdas dan menengah serta pemberantasan buta aksara, dapat dilihat dari dua indikator makro yang menjadi bagian dari indikator kabupaten termaju dan juga menjadi bagian dari komponen indikator pendidikan, indikator tersebut adalah angka melek huruf (AMH); dan rata-rata lama sekolah (RRLS).
- e. Pemenuhan jumlah, kualifikasi dan kompetensi guru sesuai standar pelayanan minimal (SPM) dalam rangka memenuhi standar nasional pendidikan pada semua jenjang juga masih perlu ditingkatkan,

G. Sistematika Penyajian

Sistematika Penyusunan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022 adalah :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini disajikan penjelasan umum organisasi, dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi organisasi

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub Bab ini menyajikan capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis Organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut:

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini;
2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir;
3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;
4. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya;
5. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja;

B. Analisis Capaian Kinerja

Pada Sub ini menggambarkan antara target dan capaian kinerja anggaran pada Tahun Anggaran 2022

C. Realisasi Anggaran

Pada Sub ini menggunakan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rencana Strategis Tahun 2021 – 2026

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau selaku penanggung jawab sistem pendidikan di Kabupaten Malinau memiliki kewajiban untuk menyediakan layanan pendidikan bermutu bagi semua masyarakat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Visi dan misi bupati dan wakil bupati terpilih periode 2021-2024 yang tertuang dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) adalah **“Terwujudnya Kabupaten Malinau yang Mandiri, Damai dan Sejahtera didukung Pemerintahan yang Profesional”**, adapun misinya adalah :

1. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul.
2. Mewujudkan pembangunan ekonomi yang berbasis pada potensi daerah, karakteristik dan kearifan lokal
3. Mewujudkan infrastruktur yang berkeadilan dan berkelanjutan
4. Mewujudkan pemerintahan yang akuntabel dan transparan

Dari empat misi tersebut di atas, yang terkait dengan kebijakan pembangun sektor pendidikan terdapat pada :

Misi ke-satu. dari misi tersebut tujuan yang ingin dicapai adalah meningkatkan derajat pendidikan masyarakat, dengan sasaran (a) Meningkatnya Jangkauan Layanan dan Mutu Pendidikan Paud, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah; (b) Meningkatnya Mutu Tenaga Pendidik dan Kependidikan Paud, Dikdas dan Dikmas.

Berdasarkan visi tersebut serta memperhatikan misi pembangunan Kabupaten Malinau tahun 2021-2026, yaitu pada misi (1) : Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Unggul. Sedangkan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dalam rangka terwujudnya Visi seperti yang telah diuraikan diatas, maka Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau 2016-2021, ditetapkan sebagai berikut :

1. Mengembangkan kualitas pelayanan pendidikan dan kependidikan;
2. Meningkatkan pemerataan dan perluasan akses pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah dalam mendapat kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu;
3. Meningkatkan sarana dan prasarana pendidikan anak usia dini, dasar dan menengah secara merata;
4. Mengembangkan pendidikan formal dan non formal yang berbasis kearifan dan keunggulan lokal.

Misi ini lebih menekankan pada pelayanan pendidikan untuk semua, yang menjadikan pendidikan bermutu dengan tidak melupakan keseimbangan dalam pemanfaatan lingkungan. Dari sisi hasil, misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau menekankan pada paradigma pembangunan manusia Indonesia seutuhnya, pembangunan karakter manusia. Konsep manusia seutuhnya itu meletakkan manusia sebagai subjek yang memiliki potensi untuk mengaktualisasikan dirinya secara optimal. Potensi yang dikembangkan mencakup tiga aspek paling elementer. Pertama, aspek afektif, yang tercermin pada kualitas keimanan dan ketakwaan, etika dan estetika, serta akhlak mulia dan budi pekerti luhur. Kedua, aspek kognitif, yang tercermin pada kapasitas berpikir dan daya intelektualitas untuk menggali dan mengembangkan ilmu pengetahuan, serta menguasai teknologi. Ketiga, aspek psikomotorik, yang tercermin pada kemampuan mengembangkan keterampilan teknis dan kecakapan praktis.

Adapun Tujuan sasaran, indikator kinerja, strategi, arah kebijakan dan program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, sebagai berikut :

2.1.1 Tujuan Dan Sasaran

1. Tujuan

Dalam rangka merealisasikan visi dan misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau maka ditetapkan tujuan ” Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat”

2. Sasaran

Adapun sasaran yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan adalah:

- a. Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan.
- b. Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar.

2.1.2 Indikator Kinerja

Dalam menyusun laporan penyelenggaraan pemerintah, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau diwajibkan untuk menyusun Pelaporan Kinerja. Penyusunan Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022, yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan. Untuk melaksanakan ini maka ditetapkan indikator kinerja dan target pada tahun 2022, sebagai berikut :

Tabel 2.1
Indikator Kinerja Utama
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	1 Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	Dapodik/BPS
		2 Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	Dapodik/BPS

SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR SASARAN	SUMBER DATA
		3 Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	Dapodik/BPS
		4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	Dapodik/BPS
		5 Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	Dapodik/BPS
2	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	1 Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	Dapodik
		2 Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Dapodik

Adapun indikator kinerja dan target Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD dapat dilihat pada table dibawah ini:

Tabel 2.2
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
1.	Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat		Persentase satuan pendidikan formal dan non formal yang terakreditasi	87,50 %	90,00 %	91,67 %	92,31%	92,86 %
		1. Meningkatkan jangkauan layanan pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,23 %	87,30 %	89,36 %	91,64 %	93,71%
			Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,97 %	86,81%	87,66 %	88,51%	89,35 %
			Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,78 %	90,80 %	92,82 %	94,84 %	96,87 %

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-				
				2022	2023	2024	2025	2026
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	859,67 %	868,13 %	876,60 %	885,06 %	893,53 %
			Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	887,79 %	908,01 %	928,22 %	948,44 %	968,66 %
		2. Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	161	201	236	266	296
			Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	615	650	672	705	728

2.1.3 Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi merupakan pernyataan-pernyataan yang menjelaskan bagaimana tujuan dan sasaran akan dicapai serta selanjutnya dijabarkan dalam serangkaian kebijakan.

Kebijakan adalah arah/tindakan yang ditetapkan oleh instansi pemerintah untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan-ketentuan yang dipergunakan untuk dijadikan pedoman, pegangan atau petunjuk dalam pengembangan program dan kegiatan guna tercapainya kelancaran dan keterpaduan dalam mewujudkan tujuan.

Dalam mencapai tujuan dan sasarannya Dinas Pemberayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Malinau memiliki beberapa strategi dan arah kebijakan, berikut disajikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 2.3
Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
Meningkatkan derajat pendidikan masyarakat	Meningkatnya jangkauan layanan pendidikan	Peningkatan dan Pengembangan sumber daya Tenaga Pendidik, kependidikan dan aparatur Dinas Pendidikan yang aktif, kreatif, inovatif, produktif dan profesional, dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya;	Pemberian tugas dan tanggung jawab menurut tugas pokok dan fungsinya yang berdasarkan kepada aturan dan hukum yang berlaku.
		Pembinaan secara berjenjang dari level staf sampai dengan pejabat eselon menurut tugas pokok dan fungsinya masing-masing	
		Peningkatan dan pengembangan sarana dan prasarana fasilitas pelayanan publik	Peningkatan kapasitas dan aksesibilitas infrastruktur dalam pelayanan public kependidikan
		Peningkatan pemanfaatan IT yang membantu dalam penyediaan data kependidikan	Membangun sistem informasi yang mudah diakses oleh <i>stakeholder</i> dan masyarakat secara luas
		Peningkatan dan pengembangan infrastruktur secara merata	Peningkatan sarana dan prasarana daerah untuk meningkatkan pelayanan publik secara berkesinambungan
		Meningkatkan standar manajemen mutu lembaga pendidikan dan kualitas kelengkapan sekolah secara merata	

Visi : TERWUJUDNYA KABUPATEN MALINAU YANG MANDIRI, DAMAI DAN SEJAHTERA DIDUKUNG PEMERINTAHAN YANG PROFESIONAL			
Misi 1 : Mewujudkan Sumber Daya Manusia Yang Unggul			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Kebijakan
	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Pembinaan dan peningkatan mutu tenaga pendidik	Peningkatan kuantitas dan kualitas tenaga pendidik bersertifikasi
		Mengadakan pemetaan antara rasio jumlah guru dengan tingkat kebutuhan sekolah akan guru di wilayah kecamatan dan desa	
		Alokasi anggaran pendidikan menurut aturan dan undang-undang yang berlaku.	Meningkatkan hubungan kerjasama yang saling menguntungkan dengan semua pihak.
		Peningkatan kualitas dan kuantitas peserta didik diberbagai jenjang dan jenis pendidikan	Penuntasan wajib belajar malinau maju secara merata terutama di wilayah pedesaan dan perbatasan
		Perluasan lembaga pendidikan formal dan non formal yang bermutu di berbagai daerah dibarengi dengan perluasan subsidi pendidikan bagi seluruh peserta didik dalam usia wajib belajar	Peningkatkan standar mutu kurikulum pendidikan yang terkini, berbudaya, agamis dan anti narkoba dalam rangka membentuk SDM berkarakter unggul
		Peningkatan kelengkapan pendukung belajar mengajar dalam pencapaian prestasi peserta didik.	Peningkatan sarana dan prasarana sekolah secara kontinyu, bertahap, berdasarkan kebutuhan prioritas

2.1.4 Program

Untuk mendukung ketercapaian sasaran strategis sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2022 tersebut, Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mengalokasikan total pagu anggaran sebesar Rp. 132.855.688, yang terbagi dalam 3 (Tiga) program yang dilaksanakan oleh 3 bidang utama di lingkungan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2.4
Program Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau

No	PROGRAM	Jumlah Kegiatan	Anggaran
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5	98.930.579.000
2	Program Pengelolaan Pendidikan	4	98.930.579.000
3	Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan	1	20.250.000.000
	JUMLAH	10	132,855,688,900

B. Rencana Kinerja Tahunan

Rencana Kinerja Tahunan sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis yang rencana jangka pendek akan dilaksanakan melalui kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan dari kebijakan anggaran yang merupakan komitmen bagi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mencapainya pada tahun 2022.

Di dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, dimana indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan yang telah ditetapkan.

Target kinerja dari sasaran strategis yang ingin dicapai Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tahun 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Rencana Kinerja Tahunan
Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,23%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,97%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,78%

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Satuan	Target
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	859,67%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	887,79%
2	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	Jumlah	161
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Jumlah	615

C. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia.

Dengan Perjanjian Kinerja, diharapkan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau dapat lebih terarah dan terdapat tolok ukur bagi manajemen untuk memastikan bahwa pelaksanaan program dan kegiatan telah selaras dengan upaya pencapaian visi dan misi Pemerintah Kabupaten Malinau.

Adapun Perjanjian Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau pada tahun 2022 adalah sebagai berikut :

No	Sasaran Strategis	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,23%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,97%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,78%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	859,67%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	887,79%
2	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	161
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	615

No	Program	Anggaran	keterangan
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	98.930.579.000	APBD/DID
2	Program Pengelolaan Pendidikan	98.930.579.000	APBD/DAK
3	Program Pendidik Dan Tenaga Kependidikan	20.250.000.000	APBD
	Total Anggaran	132,855,688,900	

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas didefinisikan sebagai suatu perwujudan kewajiban untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan dan dalam dunia birokrasi, akuntabilitas instansi pemerintah merupakan perwujudan kewajiban instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan misi instansi yang bersangkutan.

Akuntabilitas Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau adalah perwujudan kewajiban Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan dalam mencapai sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan melalui sistem pertanggungjawaban secara periodik. Pengukuran Kinerja merupakan inti dari akuntabilitas kinerja yang digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan (Kegiatan) sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau. Pengukuran tersebut merupakan suatu penilaian yang sistematis dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan berupa, Input, Output dan Outcome. Pengukuran tersebut dilakukan dengan memanfaatkan data kinerja baik dari Internal Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau, berasal dari sistem informasi yang ada maupun dari Eksternal Pemerintah. Penghitungan persentase pencapaian rencana tingkat capaian perlu memperhatikan karakteristik komponen realisasi dalam kondisi :

- 1) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik, maka digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100\%$$

- 2) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah Pencapaian Kinerja digunakan rumus :

$$\text{Persentase Tingkat Capaian} = \frac{\text{Target} - (\text{Realisasi} - \text{Target})}{\text{Target}} \times 100\%$$

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Evaluasi Kinerja dimulai dengan pengukuran kinerja yang mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja kegiatan (PKK) yang dilanjutkan dengan formulir Pengukuran Pencapaian Sasaran (PPS).

Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau pada tahun 2022 telah dapat melaksanakan tugas dan fungsinya dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari 2 (Dua) Sasaran yang ditetapkan secara umum semuanya telah dapat dicapai, hanya satu yang belum dapat terealisasi dengan baik yakni Meningkatkan pemerataan, peningkatan mutu, relevansi dan efisiensi pendidikan dengan sasaran. Terwujudnya kualitas dan kuantitas hasil pendidikan formal, dan nonformal yang mampu bersaing secara lokal, nasional maupun internasional dengan tidak meninggalkan nilai-nilai budaya sebagai wujud kearifan lokal.

Pengukuran capaian kinerja menggunakan rumus perhitungan capaian kinerja sebagai berikut :

Tabel 3.1
Capaian Indikator Kinerja Dinas Pendidikan

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	85,23%	85,23%	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	85,97%	85,97%	100%
		Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	88,78%	88,78%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	859,67%	859,67%	100%
		Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	887,79	887,79%	100%
2	Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	161	161	100%
		Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	615	615	100%

Sumber : Renstra Dinas Pendidikan Tahun 2022

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA

Pelaporan Kinerja Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan pertanggungjawaban Kepala Dinas atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan

pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan sesuai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Malinau.

Dalam menjalankan tugas-tugas Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau didukung oleh perangkat daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan program-program yang telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Malinau.

Tujuan : Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat

Pengukuran Tujuan Meningkatnya Derajat Pendidikan Masyarakat melalui 2 Sasaran dengan 7 Indikator kinerja sasaran. Dalam proses implementasi dari perwujudan tujuan ini, pengukuran capaian kinerja dari setiap indikator kinerja sasaran, dan analisa capaian kinerja dalam tujuan ini diuraikan dalam penjelasan sebagai berikut :

Tabel. 3.2
Evaluasi Pencapaian Sasaran 1
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,23%	85,23%	100%
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,97%	85,97%	100%
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,78%	88,78%	100%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	859,67%	859,67%	100%
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	887,79	887,79%	100%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dari Tabel 3.2 diatas, pada tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dengan indikator-indikator sasaran yang telah ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026, rata-rata hasil capaian kinerja mencapai 100%.

Keberhasilan pembangunan suatu wilayah ditentukan oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan merupakan salah satu cara meningkatkan kualitas SDM tersebut. Oleh karena itu peningkatan mutu pendidikan harus terus diupayakan, dimulai dengan membuka kesempatan seluas-luasnya kepada penduduk untuk mengenyam pendidikan, hingga pada peningkatan kualitas dan kuantitas sarana dan prasarana pendidikan.

Untuk mengetahui seberapa banyak penduduk yang memanfaatkan fasilitas pendidikan dapat dilihat dari persentase penduduk menurut partisipasi sekolah. Untuk melihat partisipasi sekolah dalam suatu wilayah biasa dikenal beberapa indikator untuk mengetahuinya, antara lain :

Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Sekolah (APS), serta Angka Partisipasi Murni (APM).

1. Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,23	98,01	99,60	85,64	85,63

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2022 sebesar 85,23 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 99,51 atau realisasi capaian kinerja sebesar 116,75% dan realisasi tahun 2021 sebesar 99,53 atau realisasi capaian kinerja sebesar 116,77%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -14,34% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -14,36% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.1.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	%	85,23	93,71	90,95%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD tahun 2022 sebesar 85,23 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 93,71, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar 90,95% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Partisipasi Kasar (APK) Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah dijenjang pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) umur 3-6 tahun.

APK Merupakan indikator yang paling sederhana untuk mengukur daya serap penduduk usia sekolah di masing-masing jenjang pendidikan. Sebagai indikator pelengkap dari indikator angka partisipasi murni (APM), sehingga dapat ditunjukkan besarnya penduduk yang bersekolah pada suatu jenjang namun usianya belum mencukupi atau bahkan melebihi dari usia sekolah yang seharusnya.

Adapun metode perhitungan APK adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Jumlah siswa usia 5-6 tahun dijenjang PAUD}}{\text{Jumlah penduduk usia 5-6 tahun pada kabupaten/kota}} \times 100$$

Dari tabel 3.2 diatas indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD yang ditargetkan di tahun 2022 adalah 85,23%, realisasi 85,23% dan capaian kinerja sebesar 100%. Keberhasilan ini merupakan wujud dari komitmen pimpinan dan pelaksana teknis kegiatan dalam mendukung pencapaian Program Pengelolaan Pendidikan.

Selain faktor- faktor yang mendukung keberhasilan capaian kinerja namun masih terdapat beberapa hambatan-hambatan atau kendala dalam melaksanakan indikator kinerja kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD seperti terbatasnya fasilitas yang dimiliki lembaga PAUD

Adapun alternatif solusi yang dilakukan yaitu meningkatkan anggaran Pendidikan untuk memenuhi fasilitas di Lembaga PAUD Negeri dan Swasta (Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD dan Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD).

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus :

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD sebesar Rp. 6.339.500.595 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 7.975.238.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 79,48% jika dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp1.635.737.403 atau sebesar 20,52%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui pelatihan untuk tenaga guru PAUD.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD	100%	Pengelolaan Pendidikan	79,48%

Sumber : Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD dengan realisasi keuangan 79,48%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Partisipasi Kasar (APK) PAUD adalah Program Pengelolaan Pendidikan dan juga kegiatan/sub kegiatan program yg mendukung capaian kinerja yakni kegiatan Pengelolaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas PAUD, Pengadaan Perlengkapan Siswa PAUD, Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD dan Pengelolaan Dana BOP PAUD.

2. Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,97%	97,29%	96,45%	113,16%	112,90%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A, tahun 2022 sebesar 85,97% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 97,29% atau realisasi capaian kinerja sebesar 113,16% dan realisasi tahun 2021 sebesar 96,45% atau realisasi capaian kinerja sebesar 112,90%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -11,63% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar -10,86% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.2.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	%	85,97%	89,35 %	96,21%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A tahun 2022 sebesar 85,97%. dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 89,35%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar 96,21% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI adalah jumlah penduduk usia 7-12 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SD/MI dibagi dengan jumlah penduduk usia 7-12 tahun. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tersebut. Nilai idealnya 100%. Adapun kegunaan APM adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Angka Partisipasi Murni mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (Bersekolah tepat waktu). Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah siswa usia 7-12 tahun dijenjang SD/MI/Paket A}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun pada kabupaten/kota}} \times 100$$

Dari tabel 3.2 diatas indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) yang ditargetkan di tahun 2022 adalah 85,97%, realisasi 85, 97% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A yaitu :

1. Adanya kepedulian dan apresiasi masyarakat akan pentingnya penyelenggaraan pendidikan formal maupun informal
2. Persamaan persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.

Selain faktor-faktor yang mendukung keberhasilan diatas masih terdapat hambatan-hambatan seperti masih adanya Tenaga Pendidik yang belum memiliki kualifikasi S1 Pendidikan

Adapun alternatif solusi yang dilakukan yaitu memberikan beasiswa pendidikan S1 bagi Tenaga Pendidik.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A sebesar Rp. 12.768.467.433 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 16.691.800.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 76,50% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp. 3.922.332.567 atau sebesar 23,5%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.2.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	76,50%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A dengan realisasi keuangan 76,50%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket A adalah Program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Dasar dan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar.

3. Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.3.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,78%	77,78%	85,45%	87,60%	96,24%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B, tahun 2022 sebesar 85,97% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 77,78% atau realisasi capaian kinerja sebesar 87,60% dan realisasi tahun 2021 sebesar 85,45% atau realisasi capaian kinerja sebesar 96,24%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 14,14% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 4,00% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut:

Tabel 3.2.3.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	%	88,78%	96,87%	91,64%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B tahun 2022 sebesar 88,78% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 96,87%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar 91,64% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah jumlah penduduk usia 13-15 tahun yang sedang bersekolah ditingkat SMP/MTs dibagi dengan jumlah penduduk usia 13-15 tahun. Makin tinggi APM berarti makin banyak anak usia sekolah yang bersekolah sesuai usia resmi di jenjang pendidikan tersebut. Nilai idealnya 100%. Adapun kegunaan APM adalah untuk mengetahui banyaknya anak usia sekolah yang bersekolah pada jenjang yang sesuai. Angka Partisipasi Murni mencerminkan partisipasi dan akses penduduk bersekolah pada jenjang tertentu sesuai kelompok usia pada jenjang tersebut (Bersekolah tepat waktu). Adapun formulasi yang digunakan untuk menghitung Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs yaitu :

$$\frac{\text{Jumlah siswa usia 13-15 tahun} \\ \text{dijelang SMP/MTs/Paket B}}{\text{Jumlah penduduk usia 7-12 tahun}} \times 100$$

Dari tabel 3.2 diatas indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) yang ditargetkan di tahun 2022 adalah 88,78%, realisasi 88,78% dan capaian kinerja sebesar 100%.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B yaitu :

1. Persamaan persepsi diantara pemangku kebijakan (stakeholders) dalam masyarakat untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pendidikan.
2. Pendidikan orang tua semakin tinggi.

Selain faktor- faktor yang mendukung keberhasilan diatas masih terdapat hambatan-hambatan seperti :

1. Masih ada satuan Pendidikan yang belum terakreditasi
2. Sarana dan prasarana satuan pendidikan dalam melaksanakan Asesmen Nasional tidak memadai

Adapun alternatif solusi yang dilakukan kedepan yaitu :

1. Perlu dilakukannya akreditasi sesuai aturan yang berlaku dari BAN.
2. Perlu adanya pengawasan, Bimtek dan workshop pada satuan pendidikan.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B sebesar Rp. 6.692.651.636 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 8.871.960.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 75,44% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.2.179.308.363 atau sebesar 24,56%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.3.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B	100%	Program Pengelolaan Pendidikan	75,44%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Murni (APM) SD/MI/Paket B dengan realisasi keuangan 75,44%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator Angka Partisipasi Murni (APM) SMP/MTs/Paket B adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sub kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Menengah Pertama.

4. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	859,67%	101,63%	101,65%	11,82%	11,82%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A, tahun 2022 sebesar 859,67% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 101,63% atau realisasi capaian kinerja sebesar 11,82% dan realisasi tahun 2021 sebesar 101,65% atau realisasi capaian kinerja sebesar 11,82%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 745,86% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 745,71% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.4.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	%	859,67%	893,53 %	96,21%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A tahun 2022 sebesar 859,67% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 893,53%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A sebesar 96,21.% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan ukuran daya serap sistem pendidikan terhadap usia sekolah, dalam hal ini dibatasi pada usia 7-12 tahun. APS juga merupakan salah satu indikator dasar yang biasa digunakan untuk melihat sejauh mana pemerintah memberi akses kepada warganya, khususnya warga usia sekolah dalam mengenyam pendidikan formal maupun non formal. APS dihitung dengan membandingkan antara jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau yang bersekolah dengan jumlah penduduk usia sekolah di Kabupaten Malinau.

Jika dibandingkan dengan target maka realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI di tahun 2022 mencapai target dimana realisasinya 859,67% dengan capaian kinerja 100%. Capaian kinerja ini didukung beberapa faktor yaitu:

- (1) Kesadaran mengenyam pendidikan semakin meningkat;
- (2) Daya tampung sekolah di Kabupaten Malinau yang melebihi jumlah penduduk Kabupaten Malinau usia sekolah.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A sebesar Rp. 20.989.245.030 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.27.096.873.970 atau capaian realisasi keuangan sebesar 77,46% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan

dias maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.6.107.628.940 atau sebesar 22,54%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini :

Tabel 3.2.4.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A	100%	Pengelolaan Pendidikan	77,46%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator Angka Partisipasi Sekolah (APS) SD/MI/Paket A dengan realisasi keuangan 77,46%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program pengelolaan pendidikan dengan kegiatan dan sub kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah, Pengadaan Mebel Sekolah dan Pengadaan Perlengkapan Siswa.

5. Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022 Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	887,79%	103,11%	103,12%	11,61%	11,61%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B, tahun 2022 sebesar 887,79% dengan realisasi tahun 2020 sebesar 1103,11% atau realisasi capaian kinerja sebesar 11,61% dan realisasi tahun 2021 sebesar 103,12% atau realisasi capaian kinerja sebesar 11,61%, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 761,01% terhadap capaian tahun 2020 dan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 760,92% terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.2.5.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	%	887,79%	968,66%	91,65%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B tahun 2022 sebesar 887,79% dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 968,66%, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B sebesar 91,65% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Di tahun 2022 capaian APS mencapai 100% menunjukkan bahwa warga Kabupaten malinau usia sekolah untuk tingkat partisipasi sekolah sudah meningkat dan sudah mengakses sistem pendidikan di Kabupaten Malinau. Berdasarkan capaian ini dapat dikatakan bahwa sebagian besar warga Kabupaten Malinau telah mementingkan pendidikan putra-putrinya.

Terdapat berbagai faktor yang menyebabkan anak putus sekolah seperti faktor pembiayaan, faktor lingkungan, faktor anak berkebutuhan khusus. Kemudian Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau melaksanakan Program Pendidikan untuk menanggulangi anak putus sekolah. Namun berdasarkan hasil evaluasi menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan menyebabkan anak putus sekolah ialah faktor sosial di keluarga dan lingkungan masyarakat. Anak-anak yang putus sekolah sebagian berasal dari keluarga yang bermasalah dan lingkungan masyarakat yang tidak mendukung untuk tumbuh kembang anak. Untuk mencegah anak-anak

putus sekolah maka Pemerintah Kabupaten Malinau akan bersinergi dengan perangkat desa di wilayah masing-masing untuk mendampingi anak putus sekolah agar anak dapat menyelesaikan pendidikannya sampai jenjang terakhir.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B sebesar Rp.11.455.757.950 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.16.360.659.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 70,02% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.4.904.901.050 atau sebesar 29,98%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.2.5.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya Jangkauan Layanan Pendidikan	Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B	100%	Pengelolaan Pendidikan	70,02%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Angka Partisipasi Sekolah (APS) SMP/MTs/Paket B dengan realisasi keuangan 70,02%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program Pengelolaan Pendidikan dengan kegiatan Pengelolaan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama dan sub kegiatan Pembangunan Unit Sekolah Baru (USB), Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah (DAK Fisik Reguler), Pengadaan Mebel Sekolah dan Pengadaan Perlengkapan Siswa.

Tabel. 3.3
Evaluasi Pencapaian Sasaran 2
Meningkatnya Mutu Pendidikan Dasar

Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022		Capaian Kinerja Tahun 2022 %
		Target	Realisasi	
1	2	3	4	5
Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	Orang	161	161	100%
Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik	Orang	615	615	100%

Sumber : Renstra dan Renja Dinas Pendidikan Tahun 2022

Dari Tabel 3.3 diatas tahun 2022 pencapaian sasaran meningkatnya jangkauan layanan pendidikan dengan indikator-indikator sasaran yang telah ditarget dalam dokumen Renstra 2021-2026, rata-rata hasil capaian kinerja mencapai 100%.

1. Jumlah Pendidik PAUD Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Bidang Pendidikan Anak Usia Dini, Kependidikan Lain Atau Psikologi Dan Sertifikat Guru Pendidikan Anak Usia Dini.

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.1

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun 2020 & 2021	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/2)*100
Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	Jumlah	161	-	-	-	-

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah tidak dapat disajikan karena indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini baru dilaksanakan tahun 2022.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.1.2

**Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah**

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau	Jumlah	161	296	54,39%

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini				

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini tahun 2022 sebesar 161 dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 296, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini sebesar 54,39% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam perkembangan pendidikan disuatu daerah tak terlepas dari tenaga kependidikan. Peningkatan kompetensi guru khususnya pendidikan anak usia dini atau PAUD dinilai sangat penting guna mendukung tumbuh kembang anak. Untuk itu Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mewajibkan guru PAUD wajib berijazah Sarjana (S1). Sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan dosen yang mensyaratkan kualifikasi guru harus berpendidikan D-IV atau S1.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dengan indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk tahun 2022 adalah 161 orang dan realisasi mencapai 161 orang atau capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan serius dalam meningkatkan mutu Pendidikan Anak Usia Dini.

Selain faktor- faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini

mencapai target yang telah ditetapkan namun untuk keseluruhan jumlah tenaga Pendidik PAUD yang tersebar di Kabupaten Malinau masih terdapat beberapa tenaga pendidik Anak Usia Dini yang belum memiliki ijazah D-IV atau S1.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan kedepan yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik PAUD untuk melanjutkan pendidikannya di bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD)
2. Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan beasiswa kepada pendidik PAUD yang belum memiliki ijazah D-IV atau S1 untuk melanjutkan pendidikannya.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini sebesar Rp. 448.909.090 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp. 500.000.000 atau capaian realisasi keuangan sebesar 89,78% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.51.090.910 atau sebesar 10,22%.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.1.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	89,78%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Jumlah pendidik PAUD yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) bidang Pendidikan anak usia dini, kependidikan lain atau psikologi dan sertifikat guru Pendidikan anak usia dini dengan realisasi keuangan 89,78%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan PAUD.

2. Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik

Berdasarkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.1
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Serta Capaian Kinerja Tahun 2022
Dengan Tahun Lalu dan Beberapa Tahun Terakhir

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Realisasi Tahun Lalu		Persentase kenaikan/penurunan Realisasi Capaian Kinerja tahun 2022 Vs Tahun	
			2020	2021	2020	2021
1	2	3	4	5	6 (4/3)*100	7 (5/3)*100
Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki	%	85,97	94.57	94.78	110,003	110,248

Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik						
---	--	--	--	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Perbandingan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2022 dengan tahun 2020 dan 2021 adalah perbandingan realisasi Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik tahun 2022 sebesar 615 dengan realisasi tahun 2020 sebesar 94,57 % atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,51% dan realisasi tahun 2021 sebesar 94,78% atau realisasi capaian kinerja sebesar 99,55 %, dengan demikian maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan adanya kenaikan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 24,00 % terhadap capaian tahun 2020 dan adanya penurunan capaian kinerja tahun 2022 sebesar 24,28 % terhadap capaian tahun 2021.

Berdasarkan perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2022 dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen Renstra 2021-2026 dapat disajikan sebagai berikut :

Tabel 3.3.2.2
Perbandingan Antara Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun 2022
Dengan Target Jangka Menengah

Indikator Kinerja	Satuan	Realisasi Tahun 2022	Target Akhir Renstra Tahun 2026	Persentase Capaian Terhadap Target Akhir Renstra Tahun 2026
1	2	3	4	5 (3/4)*100
Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik	Jumlah	615	728	84,47%

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2022 dengan target akhir Renstra tahun 2026 adalah perbandingan realisasi Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik tahun 2022 sebesar 615 orang dengan target akhir Renstra tahun 2026 sebesar 728 orang, maka hasil perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sampai dengan tahun 2022 pencapaiannya Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik sebesar 84,47% terhadap target akhir Renstra tahun 2026.

a. Analisis penyebab keberhasilan / kegagalan atau peningkatan / penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Dalam perkembangan pendidikan disuatu daerah tak terlepas dari tenaga kependidikan. Peran penting tenaga kependidikan sangatlah penting dalam kemajuan pendidikan disuatu daerah, tugas pokok tenaga kependidikan adalah melaksanakan administrasi, pengelolaan, pengembangan, pengawasan dan pelayanan teknis untuk menunjang proses pendidikan pada suatu pendidikan. Untuk meningkatkan mutu pendidikan dan memberikan pelayanan terbaik bagi siswa maka tenaga pendidik harus melakukan tugasnya secara baik, efektif dan efisien pada proses perencanaan yang dilakukan seluruh tenaga kependidikan yang berupaya dengan sangat serius sesuai dengan tugas pokok dan fungsi demi tercapainya peningkatan mutu pelayanan siswa disekolah.

Peningkatan kompetensi guru khususnya guru pada jenjang Sekolah Dasar (SD) dinilai sangat penting guna mendukung perkembangan anak- anak didik. Untuk itu baik pemerintah pusat maupun pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau mewajibkan guru jenjang Sekolah Dasar wajib berijazah Sarjana (S1) bidang jenjang pendidikan sekolah dasar.

Berdasarkan tabel 3.3 diatas dengan indikator kinerja Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik yang ditargetkan dalam Renstra Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau untuk tahun 2022 adalah 615 orang dan terealisasi mencapai 615 orang atau capaian kinerja mencapai target yang telah ditetapkan dalam renstra.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Pendidik pada Jenjang Sekolah Dasar yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) atau Sarjana (S1) dan Sertifikat Pendidik yaitu Pemerintah Kabupaten Malinau melalui Dinas Pendidikan serius dalam meningkatkan mutu Pendidikan pada jenjang pendidikan Sekolah Dasar .

Selain faktor- faktor yang mendukung keberhasilan indikator kinerja Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik mencapai target yang telah ditetapkan namun untuk keseluruhan jumlah tenaga Pendidik jenjang Sekolah Dasar yang tersebar di Kabupaten Malinau masih terdapat beberapa tenaga pendidik jenjang pendidikan sekolah dasar yang belum memiliki ijazah D-IV atau S1. Hal ini karena jumlah sekolah dasar yang terdapat di Kabupaten Malinau lebih banyak jika dibandingkan tenaga pendidik yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau Sarjana (S1) bidang Pendidikan jenjang sekolah dasar.

Adapun alternatif solusi yang dilakukan kedepan yaitu :

1. Memberikan kesempatan kepada tenaga pendidik jenjang sekolah dasar untuk melanjutkan pendidikannya.
2. Pemerintah Kabupaten Malinau memberikan beasiswa kepada pendidik yang belum memiliki ijazah D-IV atau S1 untuk melanjutkan pendidikannya.

b. Analisis atas efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya

Penggunaan sumber daya dalam rangka mendukung pelaksanaan program dan kegiatan terdiri atas dua yakni :

1. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya anggaran/biaya.
2. Efektivitas dan efisiensi penggunaan sumber daya manusia.

Persentase efisiensi sumber daya dapat dihitung dengan rumus:

$$\text{Persentase Efisiensi Biaya} = 100\% - \frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\%$$

Tahun 2022 realisasi penggunaan anggaran untuk mendukung indikator kinerja Jumlah pendidik pada jenjang sekolah dasar yang memiliki ijazah diploma empat (D-IV) atau sarjana (S1) dan sertifikat pendidik sebesar Rp.346.839.290 dari anggaran yang disediakan sebesar Rp.499.999.950 atau capaian realisasi keuangan sebesar 69,37% apabila dibandingkan dengan capaian kinerja sebesar 100%. Dengan menggunakan rumusan perhitungan diatas maka adanya efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian indikator kinerja tersebut sebesar Rp.153.160.660 atau sebesar 30,63%.

Untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi penggunaan Sumber Daya Manusia (SDM) dilaksanakan melalui memberikan beasiswa kepada pendidik yang belum memiliki ijazah D-IV atau S1 untuk melanjutkan pendidikannya.

c. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Setiap program yang disusun sudah sepatutnya mendukung keberhasilan capaian target kinerja yang tertuang dalam perjanjian kinerja. Salah satu cara untuk melihat realisasi suatu program adalah dengan melihat realisasi keuangan dari program tersebut. Realisasi keuangan yang baik seharusnya membuahkan capaian kinerja yang baik pula. Hubungan antara program, kegiatan, capaian kinerja dan realisasi keuangan kegiatan tergambar dalam tabel berikut ini:

Tabel 3.3.2.3
Capaian Kinerja dan Realisasi Keuangan Tahun 2022

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	CAPAIAN KINERJA (%)	PROGRAM	REALISASI KEUANGAN (%)
Meningkatnya mutu pendidikan dasar	Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan	100%	Pendidik dan Tenaga Kependidikan	69,37%

	Sertifikat Pendidik			
--	---------------------	--	--	--

Sumber : Dinas Pendidikan 2022

Dari tabel diatas, tampak bahwa indikator kinerja di dukung oleh program dalam usaha untuk pencapaiannya. Pada tahun 2022 capaian indikator kinerja Jumlah Pendidik Pada Jenjang Sekolah Dasar Yang Memiliki Ijazah Diploma Empat (D-IV) Atau Sarjana (S1) Dan Sertifikat Pendidik dengan realisasi keuangan 69,37%. Adapun program yang dapat menunjang keberhasilan capaian indikator jumlah desa mandiri adalah Program Pendidik dan Tenaga Kependidikan dan sub kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Dasar.

C. REALISASI ANGGARAN

Sumber Pendanaan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau diperoleh dari Anggaran Pendidikan dan Belanja Daerah Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022 sebesar Rp.294.430.293.982, Realisasi Anggaran sebesar Rp.247.083.557.543 atau 83,91% , dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.4
Realisasi Anggaran Dinas Pendidikan Kabupaten
Malinau

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5	BELANJA DAERAH	294.430.293.982,00	247.177.874.317,00	83,95	242.549.567.025,00
5.1	BELANJA OPERASI	277.857.533.862,00	239.895.074.042,00	86,33	224.136.967.900,00
5.1.01	Belanja Pegawai	189.969.763.582,00	157.769.098.363,00	83,04	165.194.823.019,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	98.759.558.823,00	78.317.290.243,00	79,30	75.857.439.204,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	76.611.266.649,00	58.285.875.871,00	76,08	56.106.810.340,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	61.163.819.908,00	55.589.327.371,00	90,88	56.106.810.340,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	15.447.446.741,00	2.696.548.500,00	17,45	0,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	5.979.501.716,00	5.514.803.293,00	92,22	5.426.928.984,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	5.819.550.409,00	5.375.377.793,00	92,36	5.426.928.984,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	159.951.307,00	139.425.500,00	87,16	0,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	229.829.100,00	211.250.000,00	91,91	215.210.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	229.829.100,00	211.250.000,00	91,91	215.210.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	4.759.228.600,00	4.467.630.000,00	93,87	4.440.954.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan	4.759.228.600,00	4.467.630.000,00	93,87	4.440.954.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	Fungsional PNS				
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	971.055.500,00	848.090.000,00	87,33	765.882.046,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	780.842.200,00	679.925.000,00	87,07	765.882.046,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	190.213.300,00	168.165.000,00	88,40	0,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	3.945.054.877,00	3.629.690.400,00	92,00	3.562.557.060,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	3.796.021.759,00	3.498.537.780,00	92,16	3.562.557.060,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	149.033.118,00	131.152.620,00	88,00	0,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	220.236.937,00	210.171.755,00	95,42	202.984.753,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	210.211.937,00	210.171.755,00	99,98	202.984.753,00
5.1.01.01.07.0002	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK	10.025.000,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	921.071,00	846.178,00	91,86	837.045,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	886.942,00	815.940,00	91,99	837.045,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	34.129,00	30.238,00	88,59	0,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	5.212.888.272,00	4.668.872.487,00	89,56	4.674.406.645,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	4.992.520.519,00	4.457.268.011,00	89,27	4.674.406.645,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	220.367.753,00	211.604.476,00	96,02	0,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	132.009.090,00	120.015.665,00	90,91	115.217.184,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	125.407.568,00	114.262.705,00	91,11	115.217.184,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	6.601.522,00	5.752.960,00	87,14	0,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	396.024.233,00	360.044.594,00	90,91	345.651.147,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	376.220.595,00	344.943.781,00	91,68	345.651.147,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	19.803.638,00	15.100.813,00	76,25	0,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	301.542.778,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	301.542.778,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	60.559.995.859,00	52.773.610.400,00	87,14	59.946.290.135,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	53.841.660.459,00	47.277.139.152,00	87,80	54.855.790.135,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	50.788.946.459,00	44.811.580.682,00	88,23	54.855.790.135,00
5.1.01.02.01.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PPPK	3.052.714.000,00	2.465.558.470,00	80,76	0,00
5.1.01.02.02	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN	6.718.335.400,00	5.496.471.248,00	81,81	5.090.500.000,00
5.1.01.02.02.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PNS	6.403.335.400,00	5.261.346.248,00	82,16	5.090.500.000,00
5.1.01.02.02.0002	Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas PPPK	315.000.000,00	235.125.000,00	74,64	0,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	30.650.208.900,00	26.678.197.720,00	87,04	25.745.800.680,00
5.1.01.03.03	Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD	18.537.768.800,00	15.930.097.620,00	85,93	21.670.889.280,00
5.1.01.03.03.0001	Belanja TPG PNSD	18.537.768.800,00	15.930.097.620,00	85,93	21.670.889.280,00
5.1.01.03.04	Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD	3.105.640.100,00	3.009.392.600,00	96,90	3.005.921.400,00
5.1.01.03.04.0001	Belanja TKG PNSD	3.105.640.100,00	3.009.392.600,00	96,90	3.005.921.400,00
5.1.01.03.05	Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD	8.984.050.000,00	7.722.707.500,00	85,96	900.250.000,00
5.1.01.03.05.0001	Belanja Tamsil Guru PNSD	8.984.050.000,00	7.722.707.500,00	85,96	900.250.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	22.750.000,00	16.000.000,00	70,32	168.740.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	103.980.000,00
5.1.01.03.07.0002	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	13.000.000,00	13.000.000,00	100,00	64.760.000,00
5.1.01.03.07.0003	Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ)	9.750.000,00	3.000.000,00	30,76	0,00
5.1.01.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.645.293.000,00
5.1.01.88.88	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.645.293.000,00
5.1.01.88.88.8888	Belanja Pegawai BOS	0,00	0,00	0,00	3.645.293.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	84.300.300.280,00	78.159.966.679,00	92,71	53.018.805.381,00
5.1.02.01	Belanja Barang	34.792.369.350,00	33.169.260.025,00	95,33	1.072.851.300,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	34.792.369.350,00	33.169.260.025,00	95,33	1.066.105.200,00
5.1.02.01.01.0001	Belanja Bahan-Bahan Bangunan dan Konstruksi	6.600.000,00	1.955.000,00	29,62	0,00
5.1.02.01.01.0002	Belanja Bahan-Bahan Kimia	27.940.000,00	27.858.000,00	99,70	0,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	171.714.000,00	166.742.000,00	97,10	7.500.000,00
5.1.02.01.01.0010	Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	25.000.000,00	24.550.000,00	98,20	0,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.652.000,00	9.652.000,00	100,00	26.481.000,00
5.1.02.01.01.0020	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Bengkel	0,00	0,00	0,00	7.000.000,00
5.1.02.01.01.0023	Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Lainnya	0,00	0,00	0,00	300.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	3.938.494.650,00	3.769.547.425,00	95,71	488.598.800,00
5.1.02.01.01.0026	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	90.883.700,00	87.864.100,00	96,67	61.713.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	14.208.000,00	13.756.000,00	96,81	0,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	0,00	0,00	0,00	4.500.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	0,00	0,00	0,00	12.000.000,00
5.1.02.01.01.0031	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	0,00	0,00	0,00	5.818.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	35.600.000,00	35.262.850,00	99,05	0,00
5.1.02.01.01.0034	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Pendukung Olahraga	180.012.000,00	179.631.000,00	99,78	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	6.750.000,00	6.750.000,00	100,00	16.832.400,00
5.1.02.01.01.0039	Belanja Persediaan untuk Dijual/Diserahkan-Persediaan untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat	29.530.515.000,00	28.132.121.650,00	95,26	0,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	286.200.000,00	244.955.000,00	85,58	435.362.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	468.800.000,00	468.615.000,00	99,96	0,00
5.1.02.01.02	Belanja Barang Tak Habis Pakai	0,00	0,00	0,00	6.746.100,00
5.1.02.01.02.0003	Belanja Komponen-Komponen Peralatan	0,00	0,00	0,00	6.746.100,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	29.650.204.580,00	27.296.266.868,00	92,06	22.912.293.000,00
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	28.879.131.680,00	26.788.573.038,00	92,76	21.204.632.500,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.02.01.0003	Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	10.400.000,00	0,00	0,00	19.210.000,00
5.1.02.02.01.0004	Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	2.170.670.000,00	2.058.748.000,00	94,84	596.916.000,00
5.1.02.02.01.0013	Belanja Jasa Tenaga Pendidikan	25.758.800.000,00	23.881.476.000,00	92,71	19.760.697.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	256.800.000,00	231.800.000,00	90,26	387.200.000,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	108.558.000,00	108.558.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0030	Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	225.600.000,00	223.464.000,00	99,05	171.360.000,00
5.1.02.02.01.0046	Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	0,00	0,00	0,00	193.100.000,00
5.1.02.02.01.0060	Belanja Tagihan Air	4.981.680,00	2.422.000,00	48,61	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	243.782.000,00	184.565.038,00	75,70	0,00
5.1.02.02.01.0064	Belanja Paket/Pengiriman	99.540.000,00	97.540.000,00	97,99	76.149.500,00
5.1.02.02.05	Belanja Sewa Gedung dan Bangunan	88.572.900,00	27.904.800,00	31,50	0,00
5.1.02.02.05.0043	Belanja Sewa Hotel	88.572.900,00	27.904.800,00	31,50	0,00
5.1.02.02.08	Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi	0,00	0,00	0,00	111.550.000,00
5.1.02.02.08.0004	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Arsitektur-Jasa Desain Interior	0,00	0,00	0,00	75.000.000,00
5.1.02.02.08.0017	Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Penataan Ruang-Pengembangan Pemanfaatan Ruang	0,00	0,00	0,00	36.550.000,00
5.1.02.02.10	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment)	0,00	0,00	0,00	238.960.500,00
5.1.02.02.10.0013	Belanja Jasa Ketersediaan Layanan (Availability Payment) Infrastruktur Fasilitas Pendidikan	0,00	0,00	0,00	238.960.500,00
5.1.02.02.11	Belanja Beasiswa Pendidikan PNS	682.500.000,00	479.789.030,00	70,29	478.400.000,00
5.1.02.02.11.0001	Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1	682.500.000,00	479.789.030,00	70,29	478.400.000,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	0,00	0,00	0,00	878.750.000,00
5.1.02.02.12.0001	Belanja Kursus Singkat/Pelatihan	0,00	0,00	0,00	873.500.000,00
5.1.02.02.12.0003	Belanja Bimbingan Teknis	0,00	0,00	0,00	5.250.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	365.786.400,00	297.212.000,00	81,25	821.959.118,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	365.786.400,00	297.212.000,00	81,25	69.194.000,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	33.660.000,00	33.660.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.03.02.0120	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pembersih	290.790.000,00	263.552.000,00	90,63	9.236.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	5.368.000,00
5.1.02.03.02.0125	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat-Meja Kerja Pejabat	41.336.400,00	0,00	0,00	0,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	0,00	0,00	0,00	22.000.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	7.590.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	0,00	0,00	0,00	752.765.118,00
5.1.02.03.03.0010	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	0,00	0,00	0,00	752.765.118,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	2.600.217.200,00	2.358.280.535,00	90,69	2.852.858.200,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	2.600.217.200,00	2.358.280.535,00	90,69	2.852.858.200,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	2.600.217.200,00	2.358.280.535,00	90,69	2.852.858.200,00
5.1.02.05	Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.05.01	Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.05.01.0003	Belanja Beasiswa	0,00	0,00	0,00	35.000.000,00
5.1.02.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.891.722.750,00	15.038.947.251,00	89,03	25.323.843.763,00
5.1.02.88.88	Belanja Barang dan Jasa BOS	16.891.722.750,00	15.038.947.251,00	89,03	25.323.843.763,00
5.1.02.88.88.8888	Belanja Barang dan Jasa	16.891.722.750,00	15.038.947.251,00	89,03	25.323.843.763,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
	BOS				
5.1.05	Belanja Hibah	3.587.470.000,00	3.966.009.000,00	110,55	5.923.339.500,00
5.1.05.05	Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia	3.587.470.000,00	3.966.009.000,00	110,55	5.923.339.500,00
5.1.05.05.01	Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.587.470.000,00	3.966.009.000,00	110,55	5.923.339.500,00
5.1.05.05.01.0001	Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	3.587.470.000,00	3.966.009.000,00	110,55	5.923.339.500,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	277.857.533.862,00	239.895.074.042,00	86,33	224.136.967.900,00
5.2	BELANJA MODAL	16.572.760.120,00	7.282.800.275,00	43,94	18.412.599.125,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	4.875.277.520,00	5.172.175.125,00	106,08	13.119.511.875,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	12.968.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	12.968.000,00
5.2.02.04.01.0002	Belanja Modal Alat Pemeliharaan Tanaman/Ikan/Ternak	0,00	0,00	0,00	12.968.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.913.133.070,00	1.905.875.600,00	99,62	236.378.200,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	79.875.600,00	79.875.600,00	100,00	205.367.600,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	79.875.600,00	79.875.600,00	100,00	205.367.600,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	1.833.257.470,00	1.826.000.000,00	99,60	0,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	1.833.257.470,00	1.826.000.000,00	99,60	0,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	31.010.600,00
5.2.02.05.03.0006	Belanja Modal Kursi Tamu di Ruangan Pejabat	0,00	0,00	0,00	6.600.000,00
5.2.02.05.03.0007	Belanja Modal Lemari dan Arsip Pejabat	0,00	0,00	0,00	24.410.600,00
5.2.02.06	Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar	22.086.000,00	22.080.000,00	99,97	0,00
5.2.02.06.01	Belanja Modal Alat Studio	22.086.000,00	22.080.000,00	99,97	0,00
5.2.02.06.01.0001	Belanja Modal Peralatan Studio Audio	22.086.000,00	22.080.000,00	99,97	0,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	2.039.121.200,00	1.952.602.625,00	95,75	12.790.192.275,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	% 2022	REALISASI 2021
1	2	3	4	5 = (4 / 3) * 100	6
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	1.935.999.200,00	1.887.642.625,00	97,50	8.365.197.875,00
5.2.02.10.01.0001	Belanja Modal Komputer Jaringan	14.240.000,00	0,00	0,00	2.882.305.400,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	1.896.679.200,00	1.862.562.625,00	98,20	2.383.634.075,00
5.2.02.10.01.0003	Belanja Modal Komputer Unit Lainnya	25.080.000,00	25.080.000,00	100,00	3.099.258.400,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	103.122.000,00	64.960.000,00	62,99	4.424.994.400,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	103.122.000,00	64.960.000,00	62,99	2.327.970.000,00
5.2.02.10.02.0005	Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya	0,00	0,00	0,00	2.097.024.400,00
5.2.02.19	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	79.973.400,00
5.2.02.19.01	Belanja Modal Peralatan Olahraga	0,00	0,00	0,00	79.973.400,00
5.2.02.19.01.0002	Belanja Modal Peralatan Permainan	0,00	0,00	0,00	79.973.400,00
5.2.02.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	900.937.250,00	1.291.616.900,00	143,36	0,00
5.2.02.88.88	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	900.937.250,00	1.291.616.900,00	143,36	0,00
5.2.02.88.88.8888	Belanja Modal Peralatan dan Mesin BOS	900.937.250,00	1.291.616.900,00	143,36	0,00
5.2.03	Belanja Modal Gedung dan Bangunan	11.697.482.600,00	2.110.625.150,00	18,04	5.293.087.250,00
5.2.03.01	Belanja Modal Bangunan Gedung	11.697.482.600,00	2.110.625.150,00	18,04	5.293.087.250,00
5.2.03.01.01	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja	11.400.658.600,00	1.865.361.350,00	16,36	5.293.087.250,00
5.2.03.01.01.0010	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan	11.400.658.600,00	1.865.361.350,00	16,36	5.293.087.250,00
5.2.03.01.02	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal	296.824.000,00	245.263.800,00	82,62	0,00
5.2.03.01.02.0013	Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	296.824.000,00	245.263.800,00	82,62	0,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	16.572.760.120,00	7.282.800.275,00	43,94	18.412.599.125,00
	JUMLAH BELANJA	294.430.293.982,00	247.177.874.317,00	83,95	242.549.567.025,00
	SURPLUS/DEFISIT	(294.430.293.982,00)	(247.177.874.317,00)	83,95	(242.549.567.025,00)

BAB IV

P E N U T U P

Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan Tahun Anggaran 2022. Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan ini disusun sebagai tindak lanjut dari Peraturan Presiden RI No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Kendala teknis dalam penyusunan Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan ini dimana pada pelaksanaan kegiatan tahun 2022 belum didasarkan atas dokumen perencanaan strategis, tetapi didasarkan pada dokumen Pokok-pokok Kebijakan Pelaksanaan Pemerintah Kabupaten Malinau Tahun 2022.

Meskipun demikian berkat kerja keras serta ketekunan Tim Perumus dalam mengumpulkan informasi yang diperlukan, maka Pelaporan Kinerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Pendidikan ini dapat disusun sesuai dengan waktu dan jadwal yang ditetapkan.

Selanjutnya berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai dengan VISI, MISI dan Tujuan secara Umum pelaksanaan kegiatan 2022 dapat berhasil dengan baik. Untuk pencapaian target sasaran tahun 2022 dapat terlaksana dengan baik.

Dengan Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau Tahun 2022 ini diharapkan dapat memacu pelaksanaan Pemerintahan yang melibatkan seluruh stakeholders, sehingga nantinya tercipta sasaran dan hasil kerja yang dapat dipertanggung jawabkan.

4.1. Kesimpulan.

Secara umum dari keseluruhan 2 (dua) Pencapaian sasaran strategis dan 7 (empat) indikator kinerja utama yang ditetapkan Dinas Pendidikan Kabupaten Malinau tahun 2022 rata – rata capaian kinerja yang diraih 100 %.

LAMPIRAN

Perjanjian Kinerja



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2022

Dalam rangka mewujudkan manajemen yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

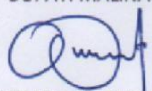
Nama : FURENG ELISA MOU, SE, M.Si
Jabatan : KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN MALINAU
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

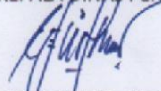
Nama : WEMPI W. MAWA, SE
Jabatan : BUPATI MALINAU
Selaku atasan Pihak Pertama, Selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Malinau, 4 Februari 2022

Pihak Kedua
BUPATI MALINAU,

WEMPI W. MAWA, SE

Pihak Pertama
KEPALA DINAS PENDIDIKAN,

FURENG ELISA MOU, SE, M.Si
NIP 19651015 198903 1 011